

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI
TENAGA KERJA INFORMAL DI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR
CABANG TANJUNG MORAWA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN TANJUNG MORAWA)**

SKRIPSI

OLEH:

**ERMIYANI DAMANIK
188520142**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/23

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI
TENAGA KERJA INFORMAL DI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR
CABANG TANJUNG MORAWA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN TANJUNG MORAWA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

**ERMIYANI DAMANIK
188520142**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

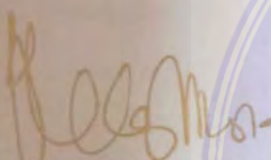
Document Accepted 3/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/23


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa).
Nama : Ermiyani Damanik
Mahasiswa :
NPM : 18.852.0142
Program Studi : Administrasi Publik


Disetujui Oleh:


Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

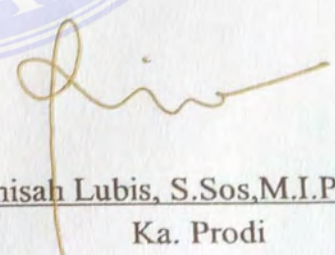
Pembimbing I


Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Pembimbing II


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I. Pol

Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 14 April 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 April 2023



Ermiyani Damanik

18.852. 0142

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ermiyani Damanik
Npm : 188520142
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : 188520142
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa).

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 14 April 2023

Yang menyatakan



(Ermiyani Damanik)

ABSRTAK

Tenaga Kerja menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian dalam proses pembangunan, maka dari itu diperlukan adanya pembangunan dari segi ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan program ini masalah yang ditemukan adalah masih kurangnya dalam hal proses peningkatan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Tanjung Morawa untuk mensosialisasikan Program tenaga kerja luar hubungan sehingga masyarakat masih kurang memahami pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi kehidupan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah: Agar dapat melihat Bagaimana Pengimplementasian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa dan apa hambatan BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan Program Tenaga Kerja Luar Hubungan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori George C. Edwards III, menurut beliau ada 4 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan SOP yang berlaku dan pegawai sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan yaitu masih kurangnya komunikasi serta kurangnya sarana fasilitas yang disediakan dalam memberikan pelayanan.

Kata Kunci : Implementasi, pelayanan, jaminan sosial

ABSTRACT

Manpower is one of the factors driving the economy in the development process, therefore development is needed in terms of employment. In the implementation of this program, the problem found is that there is still a lack of work at BPJS Ketenagakerjaan in Tanjung Morawa District to socialize the external workforce program so that public relations still do not understand the importance of BPJS Ketenagakerjaan for their lives. The purposes of this study are: Researchers want to know how the implementation of the Social Security Program for Informal Workers in the BPJS Employment Case Study in Tanjung Morawa District. And the researcher wants to know what are the obstacles of BPJS Ketenagakerjaan in disseminating the Overseas Workforce Program. The theory used in this research is using the theory of George C. Edwards III, according to him there are 4 variables that play an important role in encouraging implementation, namely: Communication, Resources, Disposition, Structure. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. The results of the study indicate that the implementation process is in accordance with the applicable SOP rules and employees have carried out their duties according to their respective functions. But there are still some obstacles, namely the lack of communication and the lack of facilities provided in providing services.

Keywords: *Implementation, service, social security*

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2001. Anak Bungsu dari Enam bersaudara. Anak dari Bapak St. Letnan Damanik dan Ibu Robekka br Purba. Riwayat pendidikan penulis adalah SD Swasta GKPS Siujan-ujan, Smp Negeri 1 Kotarih, Smk Swasta Dwi Tunggal 1 Tanjung Morawa.

Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Pada semester dua penulis memutuskan untuk kuliah sambil bekerja disalah satu perusahaan swasta di Tanjung Morawa sebagai Staff Administrasi sampai saat ini. Penulis melakukan penelitian dalam penyusunan Skripsi di Kantor Dinas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa.

Penulis juga aktif mengikuti Organisasi HIMAPSI (Himpunan Mahasiswa Pemuda Simalungun) yang sebagai anggota didalam organisasi guna untuk menambah wawasan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dengan rahmat dan karunia-Nya pula penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa)”.

Penulis menyadari peyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan baik dari segi moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yarhamdani, SE, M.SP selaku Sekretaris penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Kepada orang yang paling saya kasihi dan paling berpengaruh di dalam hidup saya, Bapak St. Letnan Damanik dan Ibu Robekka br Purba yang telah memberikan semangat dan motivasi, membiayai serta memberikan doa yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini demi keberhasilan masa depan saya.
9. Kepada Keempat Kakak saya dan Abang semata wayang dikeluarga kami, Hotlina br Damanik, Renti Apna br Damanik, Hariyati br Damanik, Nur Anggi br Damanik, Obert Israel Damanik, beserta Keempat Abang Ipar dan Edak saya yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya.
10. Bapak Iskandar selaku Kepala Cabang dari BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Tanjung Morawa yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Drixen Alexander Mawuntu dan Bapak Boris DarMO Siregar selaku Staff Penata Madya Umum dan Staff Petugas Administrasi.

12. Ibu Juliana, Bapak Muhammad Junaidi, Ibu Mirza Deswani dan Ibu Nurlela Sirait selaku informan tambahan di penelitian ini terimakasih untuk informasinya.

13. Teman-teman seperjuangan saya dari awal kuliah hingga di akhir kuliah Hanifa, Krisdayanti, Hany, Afifah, Afni, Debora, Nurma, dll. Yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.

Medan, 14 April 2023

Ermiyani Damanik



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.2 Karakteristik Kebijakan Publik	11
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	12
2.3.1 George C. Edwards III	12
2.4BPJS Ketenagakerjaan.....	16
2.5 Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja informal	20
2.5.1 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK).....	21
2.5.2 Jenis-Jenis Program dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK).....	23
2.6 Penelitian Terdahulu.....	25
2.7 Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Jadwal dan Lokasi Waktu Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	36
4.1.1Profil Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Tanjung Morawa.....	36
4.1.2 Visi dan Misi	37
4.1.3 Struktur Organisasi	38
4.2 Implementasi Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa.....	40
4.2.1 Komunikasi.....	41
4.2.2 Sumber Daya	43
4.2.3 Disposisi	46

4.2.4 Struktur Birokrasi.....	48
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Jaminan Sosial di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa	53
4.3.1 Kurangnya Komunikasi.....	53
4.3.2 Kurangnya Sarana dan Prasarana	55
BAB V KESIMPULAN.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Waktu penelitian	30
Tabel 4.1 SDM selaku pegawai pelaksana Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	62
Lampiran 2. Data Informan	64
Lampiran 3. Dokumentasi	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tenaga Kerja menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian dalam proses pembangunan, maka dari itu diperlukan adanya pembangunan dari segi ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat terlibat secara maksimal dalam proses pembangunan dan diberikan perhatian menyangkut hak-hak dan kepentingannya. Jaminan Sosial merupakan bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja sektor informal atau tenaga kerja luar hubungan. Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pemerintah mengeluarkan program jaminan sosial untuk tenaga kerja. Program tersebut meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila

seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Program Jaminan Kematian (JKM) merupakan program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja. JKJ adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja ini dikelola dengan mekanisme asuransi sosial.

Pada saat pelaksanaannya, Jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut terbatas hanya pada sektor tenaga kerja formal seperti karyawan perusahaan-perusahaan atau pekerja yang memiliki hubungan industrial. Namun amanat dalam undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah diwajibkan untuk seluruh masyarakat. Maka dari itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai memperluas kepesertaannya kepada tenaga kerja sektor informal atau tenaga kerja luar hubungan. Jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja sektor informal atau tenaga kerja luar hubungan. Mengingat resiko kecelakaan kerja yang harus ditanggung oleh tenaga kerja sektor informal pun sama dan bahkan lebih besar dari pekerjaan sektor formal atau tenaga kerja dalam hubungan.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Informal (TK-LHK) merupakan sistem perlindungan sosial yang memberikan jaminan pertanggungan berupa uang sebagai bentuk pengganti pendapatan yang berkurang atau hilang akibat resiko yang terjadi selama bekerja pada sektor informal. Sasaran penerima program jaminan sosial Tenaga Kerja Informal ini adalah tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal. Pelaksanaan program jaminan sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan ini didasarkan pada Permenkentras No. 24 Tahun 2006 mengenai penyelenggara program Jamsostek bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja. Masyarakat yang digolongkan sebagai pekerja sektor informal adalah mereka yang umumnya bekerja sendiri atas usahanya sendiri dengan resiko yang ditanggung sendiri. Contohnya : tukang ojek, pedagang kaki lima, penjual bakso, sopir, petani dan sebagainya. Namun, pekerja sektor informal ini juga ada yang mempunyai majikan. Artinya pekerja sektor informal ini bekerja pada usaha orang lain namun masih mudah untuk dimasuki karena umumnya tidak mensyaratkan keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Contohnya ialah pembantu rumah tangga, buruh bangunan, penjaga toko, buruh harian lepas dan lain sebagainya

Berbeda dengan sektor formal, program jaminan sosial Tenaga Kerja Informal kepesertaannya hanya mengandung unsur pemenuhan hak. Artinya tidak ada kewajiban yang mengharuskan tenaga kerja luar hubungan untuk menjaminkan dirinya menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini dikarenakan tenaga kerja sektor informal tidak bekerja atau terlibat dalam hubungan kerja. Kriteria untuk mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan ini adalah mereka yang bekerja dan memiliki penghasilan dengan batas usia 55 tahun dan diwajibkan membayar iuran atau premi.

Dengan adanya program jaminan sosial ini, pekerja sektor informal seperti tukang ojek maupun tukang becak tidak perlu lagi khawatir terhadap resiko yang mungkin terjadi pada saat mereka sedang bekerja atau mereka terserang penyakit serta biaya yang timbul dan kehilangan pendapatan dapat diringankan bebannya. Dalam program jaminan sosial Tenaga Kerja Informal ini diperlukan adanya suatu usaha dari berbagai pihak agar program ini bukan hanya mengejar penambahan pesertanya semata. Melainkan program jaminan sosial Tenaga Kerja Informal ini juga dapat tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh peserta program. Namun kenyataannya, program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan kerja ini dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi.

Meskipun telah bertransformasi, BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi pelaksana dari Program Jaminan sosial tenaga kerja yang melaksanakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Informal (TK-LHK). Hal ini dikarenakan perubahan tersebut hanya memisahkan masalah jaminan kesehatan kepada BPJS kesehatan. Sementara, semua pegawai dan ketentuan yang sebelumnya dijanjikan oleh PT. Jamsostek hanya berganti nama dan meningkat status hukumnya saja menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang dirumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya dan total pekerja/buruh/tenaga kerja yang terkena dampak ini sebanyak 1.010.579 orang. Rinciannya yaitu pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan sedangkan pekerja yang menjadi korban PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang terkena dampak di sektor informal sebanyak

34.453 perusahaan dan total pekerja informal sebanyak 189.452 orang (Biro HumasKemnaker, 2020).

Wakil Bupati Deli Serdang H.M.Ali Yusuf Siregar menyampaikan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bahwa sampai saat ini telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek sebanyak 5.578 orang tenaga kerja aparatur desa dan 6.227 orang tenaga kerja non ASN.“ Sampai saat ini terdapat sektor-sektor yang belum optimal dalam kepesertaan BPJamsostek seperti guru honorer, kader posyandu, pertanian, nelayan dan koperasi. Hal ini perlu kita berikan perlindungan untuk dapat dianggarkan sesuai Pemendagri No. 27 Tahun 2021 dan Surat Edaran No. 8422/5193/SJ tentang implementasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Pemda,” kata Wakil Bupati.(Sumut Pos, 2021)

Wakil Bupati menyampaikan harapannya, agar seluruh pekerja yang berada di Kabupaten Deli Serdang dapat terlindungi dalam program BPJamsostek.Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Tanjung Morawa, Iskandar mengatakan bahwa Pihak BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Kecamatan Tanjung Morawa mendorong Pemkab Deli Serdang untuk dapat memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat, saat ini masih banyak tenaga kerja yang belum terlindungi karena belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di awal tahun sudah ada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kurangnya

memahami informasi tentang pentingnya BPJS ketenagakerjaan yang membuat program ini kurang berjalan dengan baik. Iskandar menjelaskan, sejauh ini memang pihaknya sudah berupaya dan berkolaborasi dengan Pemkab untuk mensukseskan program pemerintah, program perlindungan bagi tenaga kerja. Disampaikan, untuk perusahaan yang berskala besar di Deli Serdang sudah di atas 90 persen yang terlindungi. Namun untuk yang skala menengah dan yang berada di skala mikro juga harus masuk prioritas, seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena jumlahnya masih minim.

Sebagai salah satu pelaksana program jaminan sosial Tenaga Kerja Informal memiliki suatu masalah dalam penyelenggaraan Program jaminan sosial bagi tenaga informal yakni masih kurangnya dalam hal proses peningkatan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Tanjung Morawa untuk mensosialisasikan Program tenaga kerja luar hubungan sehingga masyarakat masih kurang memahami pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi kehidupan mereka, Karena kurangnya pengetahuan atau informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan tidak banyak masyarakat yang menggabungkan diri atau masuk dalam kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal jelas dikatakan bahwa apabila tidak memiliki BPJS ketenagakerjaan peserta akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat hasil pengembangan investasi dana JHT yang sampai dengan saat ini besarnya kurang lebih 2% di atas rata-rata bunga deposito. Berdasarkan latar belakang yang tertuang diatas penulis tertarik melakukan penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa, peneliti ingin mengetahui Bagaimana Pengimplementasian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa

dimana lokasi tersebut adalah kawasan industri yang tidak banyak masyarakat yang bekerja diluar hubungan dengan perusahaan. Dan peneliti ingin mengetahui apa hambatan BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan Program Tenaga Kerja Luar Hubungan, dengan judul penelitian “**Implementasi Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa)**” Adapun rumusan masalah dalam tujuan dan manfaat penelitian yang sudah penulis cantumkan sebagaiberikut :

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini mengacu dari latar belakang masalah yang sudah dilihat dan mungkin dihadapi dari inti fenomena yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan yang diatas maka yang menjadi suatu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program jaminan sosial bagi tenaga kerja informal di badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan di kantor cabang tanjung morawa (studi kasus di kecamatan tanjung morawa)?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program jaminan sosial bagi tenaga kerja informal di badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan di kantor cabang tanjung morawa (studi kasus di kecamatan tanjung morawa)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program jaminan sosial bagi tenaga kerja informal di badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan kantor cabang tanjung morawa (studi kasus di kecamatan tanjung morawa).
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada implementasi program jaminan sosial bagi tenaga kerja informal di badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan kantor cabang tanjung morawa (studi kasus di kecamatan tanjung morawa).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Manfaat Subjektif, penelitian ini diharapkan mampu melatih serta mempertinggi serta menciptakan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologi berdasarkan kajian teori yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
2. Manfaat Akademis, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi atas penelitian yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1 di jurusan Administrasi Publik, Universitas Medan Area.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi mampu memberikan masukan untuk instansi terkait tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polia* (negara dan kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi (Dunn,2003:51). Pada perkembangannya istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya saling berkaitan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan usulan dan rancangan-rancangan besar. Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi kebijakan menurut beberapa tokoh sebagai berikut.

1. Friedrich (dalam Winarno,2002:20)

Dimana kebijakan ini Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

2. Marlowe (dalam Wicaksono, 2006:56)

Menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah upaya untuk menciptakan atau merencanakan sebuah cerita dalam rangka mengamankan tujuan tujuan

perekayasa, istilah kebijakan mengandung arti yang sama dengan pengertian kebijaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli Jamesn (dalam Wahab, 2005:2), yang dirumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dalam sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Seperti contoh dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan mengenai arti dari kebijakan, yakni suatu sikap yang diambil dari seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah dalam menentukan sebuah keputusan guna merubah kondisi seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Rouddeau (dalam Nugroho, 2003:59)

Kebijakan Publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dengan penguasaan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Maka Kebijakan Publik dapat dikatakan sebagai perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain. Kebijakan Publik tidak harus berupa perundang-undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati. Secara sederhana setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Yang diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengambil sebuah kebijakan menurut Nugroho (2003:73) menyatakan bahwa terdapat 3 tahap dari Kebijakan Publik yaitu;

- a. Perumusan Kebijaksanaan
- b. Implementasi Kebijakan

- c. Evaluasi kebijakan Berdasarkan pengertian kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan mengenai makna dari kebijakan publik, yakni keputusan badan, lembaga atau negara dalam memecahkan masalah publik melalui intervensi berupa tindakan untuk tidak melakukan apapun.

2.2 Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:45) terdapat beberapa karakteristik utama dalam, kebijakan publik diantaranya sebagai berikut :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah secara acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat bukan apa yang maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan

suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri umum kebijakan publik ialah memiliki maksud dan tujuan berkaitan antara kebijakan satu dengan kebijakan lain maupun kebijakan yang baru dengan kebijakan sebelumnya, dilakukan oleh pemerintah, berbentuk positif untuk melakukan tindak apapun, serta berdasarkan hukum atau memiliki kewenangan.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Suatu tindakan pemerintah baru dikatakan sebagai suatu kebijakan apabila tindakan tersebut dilaksanakan, bukan hanya suatu keinginan semata. Suatu keinginan saja yang belum dilakukan pemerintah belum dapat dianggap sebagai kebijakan.

2.3.1. George C. Edwards III

Menurut beliau studi implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tetap atau dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin mengalami dalam kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik

oleh para pelaksana kebijakan. Dengan ini menunjukkan variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi. Yaitu 4 variabel sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

2. Sumber daya

sumber-sumber menunjukan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu sumber-sumber yang penting meliputi :

- a. Kecukupan dan Kualifikasi Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterampilan yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.
- c. Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah

segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

- d. Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Disposisi

Menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program dan kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan dalam program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama

adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program dan kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus webberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis. Berdasarkan penjelasan di atas, keempat variabel dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan suatu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program dan kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan korupsi atas dana program atau kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

2.4. BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja adalah setiap orang yang

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah pekerja yang bekerja disuatu perusahaan sehingga dilindungi oleh pemerintah dan umumnya dikenai pajak tertentu, misalnya pekerja formal seperti PNS, dokter, guru, pegawai BUMN dan lain sebagainya. Pekerja informal adalah pekerja yang bekerja tidak terikat dengan struktur organisasi perusahaan, baik mempunyai penghasilan tetap maupun tidak, contoh pekerja informal adalah pembantu, tukang becak, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Pekerja formal dan pekerja informal, keduanya mempunyai hak yang harus dilindungi oleh perusahaan dan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja memperoleh hak yang sama dalam perlakuan tanpa adanya diskriminasi, baik diskriminasi ras, agama, suku, warna kulit maupun golongan tertentu. Apabila perusahaan melanggar ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perusahaan diberikan sanksi administrasi berupa teguran peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin. Adapun hak-hak pekerja yang sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Hak atas pekerjaan dan pengasilan yang layak;
2. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial;

3. Hak atas kebebasan dalam memilih dan pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan;
4. Hak atas kebebasan dan pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh, menambah keahlian serta keterampilan;
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama;
6. Hak untuk mendapatkan, mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja.
7. Hak untuk mendapatkan istirahat tahunan;
8. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan;
9. Hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan. Pekerja selain mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terhadap perusahaan.

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan presentasi;
- b. Wajib mematuhi peraturan perusahaan;
- c. Wajib mematuhi perjanjian kerja;
- d. Wajib memenuhi perjanjian perburuhan;
- e. Wajib menjaga rahasia perusahaan;
- f. Wajib mematuhi peraturan majikan;
- g. Wajib memenuhi segala kewajiban sebelum izin belum diberikan dalam hal ada banding yang belum ada putusannya;
- h. Wajib melakukan pekerjaan;

- i. Wajib memberikan keterangan benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- j. Wajib memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- k. wajib memakai dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku ditempat kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa jenis pekerja dibagi menjadi pekerja formal dan informal. Pekerja dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai hak dan kewajibannya. Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih banyak pekerja yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan jaminan sosial.

Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diberikan bagi pekerja. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa program jaminan BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa sistem jaminan sosial mempunyai asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya

program jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap pekerja atau anggota keluarganya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. Kegotong royongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana amanat; dan
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

2.5. Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal

Setiap orang yang melakukan suatu pekerja sangatlah membutuhkan perlindungan sosial, sebab setiap pekerjaan pasti adanya risiko yang kemungkinan menimpa diri pekerja. Hal ini sejalan dengan definisi dari tenaga kerja berdasarkan pada pengaturan hukum perburuhan yang dijelaskan oleh Tri Sulstiyono dalam *International Journal of Business, Economics, and Lawyang berjudul Study on the Informal Workers' Welfare in Micro Small Business in Gunungpati District of Semarang Vol.6, Issue 4: 67-73 bahwasannya:*

“Therefore, based on the various definitions of manpower, workers, entrepreneur and company showed that the labor law set and cover protections for all workers both in the formal or informal sectors. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja menurut Permenkentras No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Informal adalah program yang bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Tujuan dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Informal yaitu :

1. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Memperluas cakupan kepersertaan program jaminan sosial tenaga kerja.

2.5.1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK)

Prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial untuk tenaga kerja di luar hubungan kerja adalah (Jurnal Petunjuk teknis TK-LHK) :

1. Keapersertaannya bersifat sukarela dan hanya dapat diikuti oleh Tenaga Kerja Informal (LHK) yang usianya belum mencapai 55 tahun dan pendaftarannya dapat dilakukan sendiri atau dihimpun melalui wadah.
2. Tenaga Kerja Informal (LHK) dapat memilih program jaminan sosial yang akan diikuti pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Penghasilan yang akan dipakai sebagai dasar upah pembayaran premi atau iuran sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)/ Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat. (Sesuai lampiran 1 dan 2 Permekentras No. 24/MEN/VI/2006).
4. Iuran dapat dibayarkan setiap bulan atau setiap tiga bulan dibayar didepan/dimuka. Pembayaran dapat dilakukan oleh peserta sendiri atau melalui penanggung jawab wadah. Pembayaran iuran melalui wadah/kelompok dibayarkan pada tanggal 10 bulan berjalan disetorkan ke wadah/kelompok dan tanggal 13 bulan berjalan wadah/kelompok setor ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
5. Bagi peserta yang menunggak iuran masih diberikan masa tenggang selama satu bulan untuk mendapatkan jaminan program yang diikuti.
6. Peserta yang telah kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya kembali jika peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan iuran yang tertunggak dalam masa tenggang.

7. Batasan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktifitas sesuai dengan pekerjaannya.

Ada pula syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta ketika ingin mendaftarkan diri ke dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Informal ini yaitu antara lain :

- a. Isian Pendaftaran Kelompok
- b. Isian Rincian Iuran Tenaga Kerja
- c. Isian Pendaftaran Tenaga Kerja
- d. Isian Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran
- e. Foto Copy KTP
- f. Foto Copy KK
- g. Foto Pendaftar 2x3 (lembar).

2.5.2. Jenis-Jenis Program dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK)

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdiri dari :

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.
- b. Penggantian Upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
- c. Biaya perawatan medis diberikan maksimum Rp. 20.000.000
- d. Santunan cacat tetap sebagian dan santunan cacat total tetap.
- e. Santunan kematian
- f. Biaya rehabilitasi

2. Program Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Jaminan Kematian (JKM) terdiri dari :

- a. Santunan Kematian.
- b. Santunan berkala per bulan yang diberikan (selama 2 tahun) atau dapat diberikan sekaligus dimuka.
- c. Biaya pemakaman.

3. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia pensiun 55tahun.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, seperti Skripsi. Ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Indah Choirunnisa, Skripsi, dengan judul Implementasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan Di PT. Antikode Desain Ekspriensia Tangerang Selatan. Jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data, dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitiannya adalah Implementasi berjalan dengan baik sesuai Undang-Undang. Jaminan sosial ini juga telah diwajibkan oleh pemerintah bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban para pekerja terpenuhi dengan baik. Persamaan dari penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang BPJS Ketenagkerjaan. Perbedaannya terletak pada objek dari penelitian.
2. Sinta Yunistiana Dewi, Skripsi, Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tangerang. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja informal yang menjadi peserta program jaminan sosial Tenaga Kerja Informal justru memahami program ini sebagai bentuk tabungan dalam Jaminan hari tua dari pada meringankan beban akibat resiko kecelakaan kerja dan kematian yang berdampak pada

penghasilannya. Sama-sama membahas tentang implementasi program jaminan sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Oleh BPJS. Perbedaannya terletak pada Lokasi Penelitian.

3. Luhur Sanitya Pambud, Jurnal, Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Ditinjau dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data, dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di kota semarang pada kepesertaan sudah memenuhi target, kemudian untuk pembayaran iuran sangat mudah dan terjangkau. Selain itu juga pembayaran iuran fleksibel. Penelitian ini sama-sama membahas tentang BPJS ketenagakerjaan dan metode juga kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada judul yang ditambah BPJS ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.
4. Adelia Niena Endrastuti, Skripsi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Swasta DiKabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara Yuridis Empiris .Sumber data yang digunakan adalah data Primer yang dikumpulkan melalui wawancara, serta observasi yang kemudian akan di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sangatlah penting bagi tenaga pendidik sekolah

menengah pertama swasta dikabupaten brebes sebagai pemberi jaminan sosial. Sama-sama membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ini membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Swasta.

5. Siti Ummu Adillaha dan Sri Anik, Jurnal, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan mengkaji tentang aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, dari politik hukum pengelola jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga sektor informal menjadi prioritas karena tenaga kerja diluar hubungan kerja ini mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Pelaksanaan program ini masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: kurangnya kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan pihak tenaga kerja sektor informal, kurangnya sosialisasi, sulitnya menghubungi dan menelusuri keberadaan tenaga kerja mandiri, sedangkan dari sisi tenaga kerja yaitu pembayaran iuran dan jumlah pembayaran santunan yang tidak sesuai dengan tingkat kecelakaan kerja. Penelitian ini sama-sama membahas tentang jaminan sosial tenaga kerja informal.

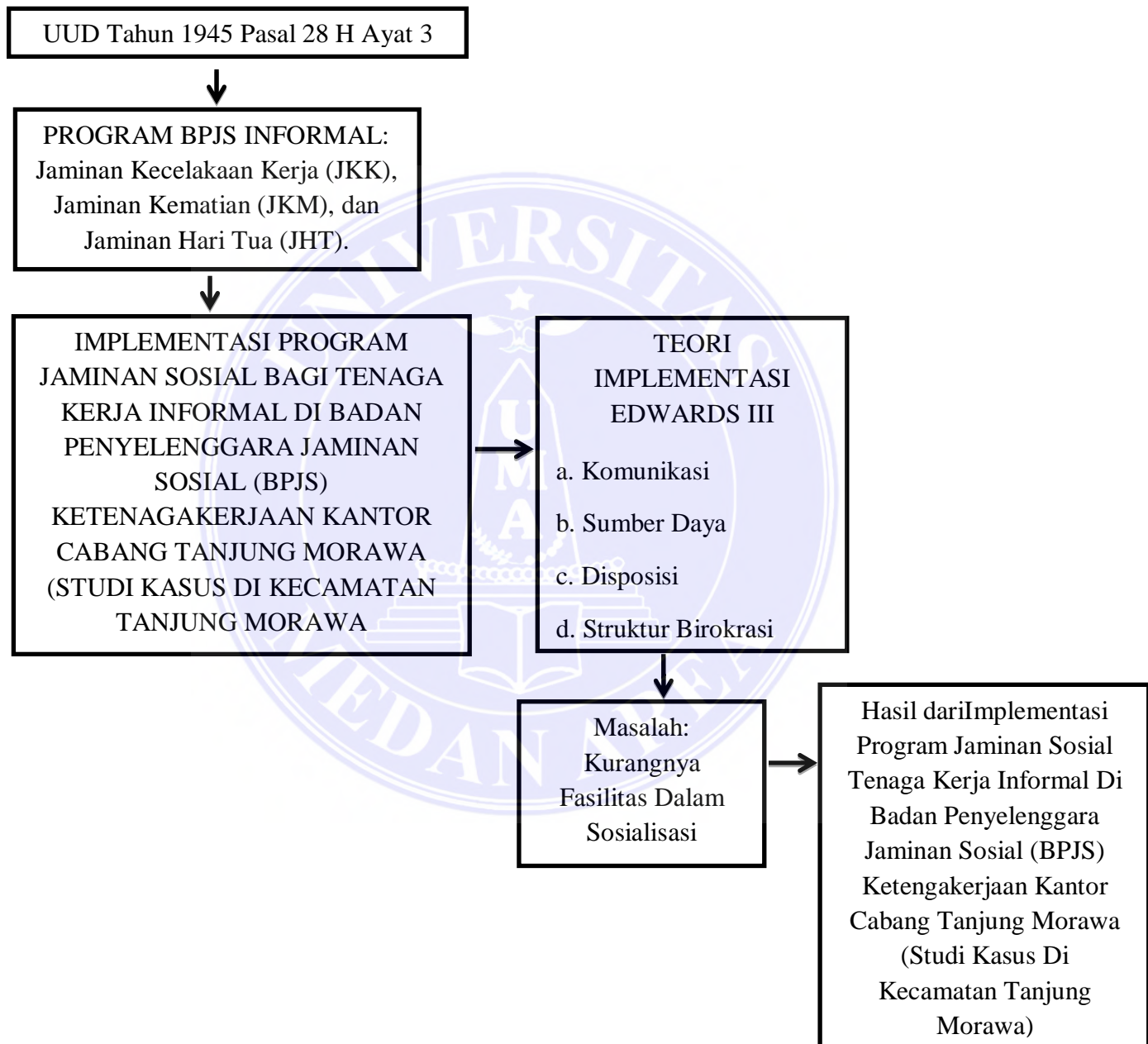
2.7. Kerangka Berfikir

Kerangka teoritis (kerangka berpikir) adalah alur pikir yang digunakan sebagai alat pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan, agar

peneliti tidak membuat persepsi sendiri. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, dimana artinya adalah data yang diperoleh bukan bentuk angka-angka, tetapi sebagai hasil dari wawancara, catatan lapangan, naskah, dan catatan resmi. Penelitian ini berupaya mengetahui dan menganalisis implementasi program jaminan sosial Tenaga Kerja Informal yang diberikan untuk Tenaga Kerja Informal di Kecamatan Tanjung Morawa dan program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kecamatan Tanjung Morawa. Maka, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena melalui metode kualitatif peneliti dapat mempelajari mengenali subyek yang diteliti dan merasakan perasaan subyek yang diteliti.

Pemilihan metode ini dilator belakangi atas pertimbangan, bahwa penelitian di fokuskan untuk mengetahui fakta-fakta, gejala-gejala atau fenomena-fenomena tertentu serta menggambarkan proses atau peristiwa yang ada pada masa sekarang. Selanjutnya untuk mengkaji hal tersebut terdapat istilah kualitatif.

3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Perlu dilakukan penelitian guna memperoleh data dan informasi untuk digunakan dalam pembuatan proposal penelitian ini dan menjawab tantangan yang telah ditonjolkan. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kecamatan Tanjung Morawa menjadi fokus penyelidikan ini. Masalah pelaksanaan Program

Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal menjadi alasan penulis memilih situs ini.

Tabel3.1
Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Aug 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Mar 2023	Apr 2023
1.	Pengajuan Judul											
2.	Bimbingan Proposal											
3.	Seminar Proposal											
4.	Data/Penelitian											
5.	Seminar hasil											
6.	Perbaikan Skripsi											
7.	Sidang											

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian. Artinya, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati.

Adapun dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen dalam penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validitas terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian yang baik secara akademik maupun logistiknya. Adapun yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2012:59).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa ada perantara, dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda, situs, atau manusia. Seorang peneliti sosial bisa mendapatkan data-data primernya dengan cara menyebarkan kuisioner, melakukan wawancara mendalam, atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat. Seperti data lain pada umumnya, data primer bisa berkualitas baik atau buruk. Bila peneliti sembarangan atau salah langkah dalam pengumpulan data-data primer ini, hasilnya pasti berupa data-data yang buruk meskipun data tersebut data primer. Karena itu peneliti tidak boleh berasumsi bahwa data primer selalu lebih baik daripada data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen, seperti laporan, karya tulis, Koran, majalah dan sebagainya. Misalnya saja jika seseorang mendapatkan informasi dari “orang lain” tentang suatu objek yang ingin diteliti. Maka, orang lain inilah yang mendapatkan data primernya, tetapi apabila orang lain ini bercerita kepada peneliti maka peneliti yang mendapatkan data sekunder.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Informan pada penelitian ini. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa Bapak Iskandar
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan Utama dalam penelitian ini Staff Penata Madya Umum BPJS yaitu Bapak Drixen Alexander Mawuntu dan Petugas Administrasi Peserta yaitu Bapak Boris Darmo Siregar.

3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan pada penelitian ini yaitu tenaga kerja luar hubungan, yaitu:

- a. Ibu Mirza Deswaniselaku informan tambahan sekaligus pemohon pembuatan Kartu Bpjs
- b. Ibu Julianaselaku informan tambahan sekaligus pemohon pembuatan BPJS Ketegakerjaan
- c. Bapak Muhammad Junaidi selaku informan tambahan
- d. Ibu Nurlela Sirait selaku informan tambahan

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Istilah "data" mengacu pada segala sesuatu yang mungkin direkam atau dijelaskan, serta fakta. Masih banyak cara untuk melihatnya, termasuk gambar dan suara yang otentik dan benar serta dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Koentjaraningrat (1986) dalam Gunawan Imam (2015:166) Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti dalam menentukan informan kunci sesuai dengan kriteria dalam penetapan informan kunci yaitu seseorang yang mengetahui seluk beluk dan dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Data dari sumber yang sama dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam skenario ini (Sugiyono, 2012: 83). Perlu adanya informasi dan data lebih lanjut untuk penelitian ini.

1. Studi kepustakaan

Yang berarti bahwa semua upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan untuk penyelidikan dihitung. Sumber pengetahuan lainnya antara lain jurnal ilmiah, esai, tesis, dan disertasi, serta peraturan, buku tahunan, dan jenis bahan tertulis lainnya.

2. Observasi

Melakukan pengamatan metodis dan mencatat apa yang Anda amati adalah proses mengamati. Kegiatan observasi dan pencatatan langsung dilakukan secara non partisipatif, artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan hanya mencatat topik-topik yang penting untuk tujuan penelitian. Pertama, peneliti menilai lokasi atau konteks di mana ia ingin melakukan penelitiannya dalam hal ini kantor kepegawaian Kecamatan Tanjung Morawa

3. Wawancara Menurut (Arikunto,2006:155)

Untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai, pewawancara terlibat dalam diskusi dengan mereka. Dengan menggunakan tanya jawab, wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan responden untuk mendapatkan informasi yang berarti dari sudut pandang responden. Selain itu, kita akan berbicara tentang teknik wawancara, yaitu metode pengumpulan informasi dan data dari lokasi atau masalah tertentu dengan mewawancarai seorang informan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Orang-orang berikut menjabat sebagai informan untuk penyelidikan ini:

- a. Kantor ketenagakerjaan cabang tanjung morawa
- b. Kasubag. Pelayanan Umum
- c. Pelayanan Pegawai atau karyawan Di ketenagakerjaan cabang tanjung morawa
- d. Terkhususnya Melayani Masyarakat Atau Orang-orang Membutuhkan (BPJS) Pada Dinas BPJS Ketenagakerjaan Kecamatan tanjung morawa.

4. Dokumentasi Menurut (Sugiyono,2012:240)

Kata-kata tertulis dapat digunakan untuk mewakili catatan, seperti buku harian, sejarah hidup, narasi, biografi, peraturan atau kebijakan, gambar, atau karya orang lain. Hasilnya, peneliti melakukan penyelidikan ini dan mengumpulkan informasi dalam bentuk catatan, dokumen, transkrip, buku, dan aturan apa pun yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi dari layanan program jaminan sosial Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa dengan menggunakan indikator Edward III (1980) meliputi:
 - a. Komunikasi. Masih ada beberapa proses promosi yang belum dilakukan dari pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa salah satunya upaya untuk promosi melalui media cetak dengan pembagian brosur serta penggunaan banner di sekitaran wilayah lokasi Tanjung Morawa.
 - b. Sumberdaya pendukung masih belum sepenuhnya mendukung terutama dalam penyediaan fasilitas pelayanan.
 - c. Disposisi pada kesiapan pelaksanaan Layananprogram jaminan sosial sudah cukup baik, bertanggungjawab memberikan rasa aman dan nyaman selama proses pelaksanaan serta patuh terhadap aturan-aturan kebijakan peraturan protokol kesehatan.
 - d. Struktur Birokrasi pada pelaksanaan layanan program jaminan sosial sudah cukup baik dan sudah terjalin koordinasi dan kerjasama di tiap unsur.
2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa

- a. Kurangnya Komunikasi. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak kantor Bpjs Ketenagakerjaan dalam upaya mempromosikan layanan bpjs ketenagkerjaan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana. Masih kurangnya kebutuhan saran dan prasarana yang mendukung terlaksananya implementasi layanan pembuatan kartu bpjs salah satunya seperti kurangnya sdm pelaksana.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pelayanan program jaminan sosial Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Tanjung Morawa penulis memberikan saran yaitu:

1. Diharapkan pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawadapat melakukan sosialisasi lebih baik lagi dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang masih belum tersedia untuk kelancaran proses pelaksanaan layanan BPJS Ketenagakerjaan serta melakukan evaluasi secara bersekala untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk seterusnya
2. Untuk Pemerintah diharapkan dapat juga berperan memberikan dukungan dengan membantu penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai dalam suatu kegiatan pelayanan sehingga masyarakat dapat percaya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kemasyarakat saat ini sudah lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. (2005). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagong, Suyanto. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo
- Dunn, William N.(2003).Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta,. Gajah Mada University
- Eko, Anu Agustinova, (2015) Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik. Yogyakarta: Calpulis
- Gunawan, Imam. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hamzah, Andi, (2001) Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
- Indra Muda,& Beby Masitho Batubara. (2019) *Analisis Kebijakan Publik*, Medan: Universitas Medan Area
- Miles Humberman, (2010) Analisis Publik Administrasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sugiyono.(2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Sulastomo, (2008) Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sulistiyowati, (2013) Hubungan antar sosial pada Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: ISBN
- Widya Wicaksono. Kristian. (2006). Administrasi dan Birokrasi. Graha.Binu. Yogyakarta

Jurnal :

- Sanitya, Pambudi Luhur (2019) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016, Vol. 1 No.2
- Ummu, Siti Adillaha dan Sri Anik, (2015) Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Vol. 4 No. 3

Skripsi :

- Adelia Niena Endrastut, Adelia, (2020) Peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Swasta Di Kabupaten Brebes. Skripsi, Universitas Panca Sakti Tengal.
- Choirunnisa, Indah, (2020) Implementasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan Di PT. Antikode Desain Ekspriensia Tangerang Selatan. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Shinta Yunistiana Dewi. (2015) Implementasi program jaminan sosial Tenaga Kerja Informal oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan di kabupaten tangerang. Universitas Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Wan Ezah. (2019) Analisis upaya badan penyelenggaraan jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan kantor wilayah riau dalam meningkatkan kepersertaan tenaga kerja informal di kota pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Pekanbaru, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Peraturan Pada Undang-Undang

- Permenentras No. 24 Tahun 2006 mengenai penyelenggara program Jamsostek bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ditekankan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.
- Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah diwajibkan untuk seluruh masyarakat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pemerintah mengeluarkan program jaminan sosial untuk tenaga kerja.

Sumber Dari Internet:

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

<https://www.jamsosindonesia.com/>



LAMPIRAN 1

PEDOMANAN WAWANCARA

Implementasi Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal Di BPJS

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa

<p>KOMUNIKASI</p>	<p>Informan Kunci :</p> <p>Informan Utama :</p> <p>Informan Tambahan :</p>	<p>1. Kepada siapa saja layanan Bpjs ketenagakerjaan dapat diberikan?</p> <p>2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor bpjs ketenagakerjaan terkait layanan Bpjs ketenagakerjaan ? Dalam bentuk seperti apa? Sejak kapan dilakukan sosialisasi?</p> <p>3. Apakah ada pihak yang ikut bekerjasama dalam program layanan Bpjs ketenagakerjaan ?</p> <p>1. Apa yang menjadi kendala yang mengakibatkan masyarakat belum bergabung dalam program jaminan Tenaga Kerja Informal ?</p> <p>1. Sebelumnya dari mana Bapak/ ibu mengetahui adanya layanan Bpjs ketenagakerjaan ?</p> <p>2. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk bergabung dalam program jaminan sosial ini ?.</p>
<p>SUMBER DAYA</p>	<p>Informan Kunci :</p> <p>Informan Utama :</p>	<p>1. Berapa jumlah para pelaksana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan Bpjs ketenagkerjaan ? Terdiri dari bagian apa saja?</p> <p>2. Berapa banyak jumlah pemohon yang dapat dilayani melalui Bpjs ketenagkerjaan ?</p> <p>1. Apakah kesiapan Fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendukung proses pelaksanaan pelayanan ?</p> <p>2. Apakah para pelaksana sudah melakukan pelayanan Bpjs ketenagakerjaandengan cepat dan tepat waktu?</p> <p>1. Menurut Ibu apa yang menjadi kendala dalam proses pengurusan kartu</p>

	Informan Tambahan :	BPJS ?
DISPOSISI	Informan Utama : Informan Tambahan :	<p>1. Apakah Sikap para pelaksana sudah memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan?</p> <p>2. Apakah system teknologi dan jaringan sudah lengkap dan memadai saat pelaksanaan Bpjs ketenagakerjaan ? Apakah tidak ada kendala?</p> <p>1. Bagaimana Pelayanan yang diberikan Petugas BPJS Ketenagakerjaan ?</p> <p>2. Apa saja keunggulan dan kekurangan dari Layanan Bpjs ketenagakerjaan?</p>
BIROKRASI	Informan Kunci : Informan Utama : Informan Tambahan :	<p>1. Apakah sudah ada Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan Bpjs ketenagakerjaan ? Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP ?</p> <p>2. Bagaimana Pelaksanaan SOP nya ?</p> <p>1. Bagaimana Pembagian petugas dalam pelaksanaan pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan?</p> <p>1. Apakah para pelaksana sudah memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan?</p> <p>2. Apakah Bapak/ Ibu sudah mengetahui syarat-syarat apa saja dalam pembuatan kartu BPJS Ketenagakerjaan ?.</p>

LAMPIRAN II

DATA INFORMAN

1. Informan Kunci

Nama : Iskandar
Jenis Kelamin : Laki –Laki
Jabatan : Kepala Cabang

2. Informan Utama

Nama : Drixen Alexander
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Jabatan : Penata Madya Umum

3. Informan Utama

Nama : Boris Darmo Siregar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Petugas Administrasi

4. Informan Tambahan

Nama : Juliana
Jenis Kelamin : perempuan
Jabatan : Masyarakat

5. Informan Tambahan

Nama : Muhammad Junaidi
Jenis Kelamin : laki -laki
Jabatan : Masyarakat

6. Informan Tambahan

Nama : Mirza Deswani

Jenis Kelamin : Perempuan

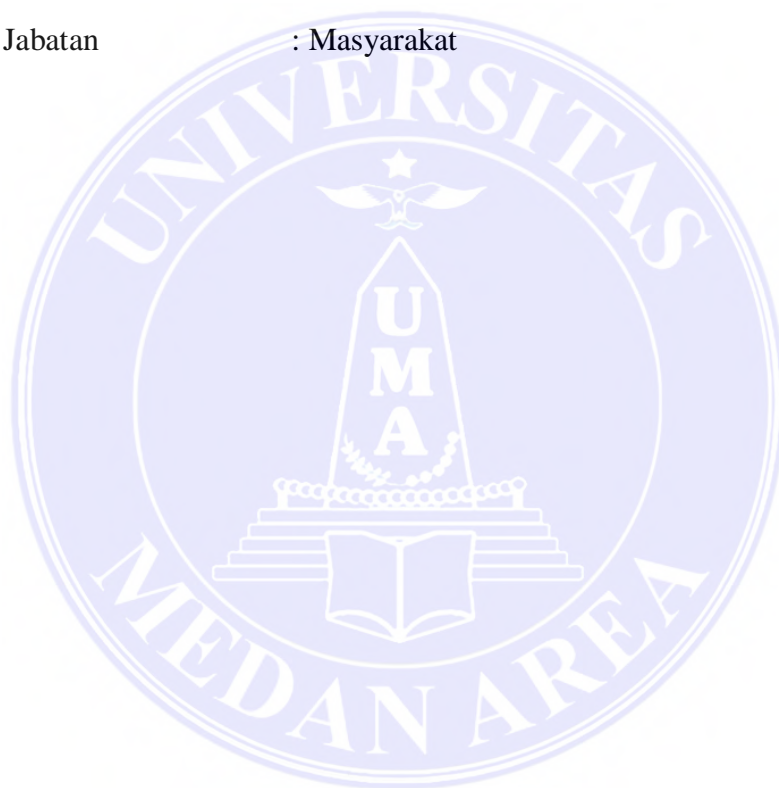
Jabatan : Masyarakat

7. Informan Tambahan

Nama : Nurlela Sirait

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Masyarakat



LAMPIRAN III

DOKUMENTASI LAPANGAN



Gambar 1. Dokumentasi foto Kantor Bpjs Ketenagakerjaan (Dokumentasi Pribadi: kamis,04 Agustus 2022 Pukul 11:30 WIB).



Gambar 2. Dokumentasi foto Bersama bapak Dixen Alexander selaku informan utama (Dokumentasi Pribadi: kamis, 04 Agustus 2022 Pukul 10:30 WIB).



Gambar 3. Dokumentasi foto suasana pelayanan di kantor Bpjs Ketenagakerjaan Tanung Morawa (Dokumentasi Pribadi: jumat, 12 Agustus 2022 Pukul 11:30 WIB).



Gambar 4. Dokumentasi foto suasana pelayanan di kantor Bpjs Ketenagakerjaan Tanung Morawa (Dokumentasi Pribadi: jumat, 19 Agustus 2022 Pukul 11:30 WIB).



Gambar 5. Proses Sosialisasi



Gambar 6. Fasilitas layanan di kantor Bpjs ketenagkerjaan Tanjung Morawa



Gambar 7. Foto Bersama Masyarakat selaku Informan Tambahan



Gambar 8. Foto Bersama Masyarakat selaku Informan Tambahan



Gambar 9. Foto Bersama Masyarakat selaku Informan Tambahan